

***Effect of Government Accounting Standards, Quality of Regional Apparatus,
Utilization of Information Technology, Internal Control Systems and
Coercive Pressures of The Quality of Financial Statements Local
Government
(Empirical Study of City in OPD Magelang)***

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian *Intern* Dan Tekanan Koersif
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
(Studi Empiris Pada Opd Pemerintah Kota Magelang)

Ima Innayah Safitri

Universitas Muhammadiyah Magelang

imainnayahs@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon in the development of the public sector in Indonesia is the strengthening of the demand for the quality of government financial reports. The resulting government financial report must meet the qualitative characteristics of Government Regulation No. 71 of 2010. This study aims to empirically examine the effect of government accounting standard, the quality of regional apparatus, the utilization of information technology, the internal control systems, and the coercive pressures on the quality of local government financial statements. The data in this study uses primary data by distributing questionnaires. The study was conducted on OPD Kota Magelang which amounted to 28 OPD in the Government of Magelang City. The sampling method uses purposive sampling. The research sample consists of 99 employees in OPD in Magelang City who have the criteria that are leaders of subdivision heads, and treasurers or financial section employees who have worked for more than 1 year. The analytical tool used is through Multiple Linear Regression implemented in SPSS, F test and T test. The results showed that the quality of the regional apparatus, the utilization of information technology, and the internal control systems has positive influence on the quality of local government financial statements. On the contrary, the government accounting standard and coercive pressures have no positive effect on the quality of local government financial statements.

Keywords : Government Accounting Standards, Quality of Regional Apparatus, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, Coercive Pressures, Quality of Local Government Financial Statement

ABSTRAKSI

Fenomena di dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan tekanan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian dilakukan pada OPD Kota Magelang yang berjumlah 28 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian ini terdiri dari 99 pegawai di OPD Kota Magelang yang memiliki kriteria yaitu merupakan pimpinan kasi/kasubag, serta bendahara atau pegawai bagian keuangan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS dengan Regresi Linier Berganda, Uji F dan Uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan standar akuntansi pemerintah dan tekanan koersif tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: *Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Tekanan Koersif, Kualitas Laporan Keuangan*

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat dan pemerintah pusat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Masmudi, 2003). Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib

pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan BPK, yang secara resmi opininya dikeluarkan setelah memeriksa tingkat kewajaran laporan keuangan, laporan keuangan pemerintah Kota Magelang, dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini WDP (2014-2015) dan WTP untuk tahun 2016 – 2018. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1
Opini BPK atas LKPD Kota Magelang

No	Nama Pemerintah Daerah	Opini Badan Pengawas Keuangan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Magelang	<u>WDP</u>	<u>WDP</u>	<u>WTP</u>	<u>WTP</u>	<u>WTP</u>

Sumber : IHPS BPK, Tahun 2014 s.d 2018

BPK masih menemukan beberapa catatan baik terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terkait SPI, permasalahan-permasalahan yang ditemukan antara lain adalah Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Tidak Tertib, antara lain Pajak belum disetor ke Kas Negara, Rekening Dana BOS dikenakan pajak dan biaya administrasi. Adapun terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK antara lain menemukan hal-hal sebagai berikut: (1) Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik (gedung, jalan dan bangunan lainnya) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran (LHP LKPD, 2018).

Pada Pemerintah Kota Magelang masih terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan Pemungutan / Pematangan Pajak sebesar Rp10.534.064,00 dari Pihak Ketiga belum disetor ke Kantor Pajak per 31 Desember 2018 (Laporan Keuangan, 2018).

Beberapa penelitian tentang kualitas laporan keuangan telah dilakukan sebelumnya namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian, Juwita (2018) penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari (Modo *et al*, 2016) dan Agustini (2016) yang menunjukkan SAP berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian (Mahardini dan Miranti, 2018) menunjukkan kualitas sumber daya berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan tidak sejalan dengan penelitian (Firdaus *et al*, 2015) yang memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian (Firdaus *et al*, 2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan (Rico Tampaty, 2016) dan (Modo *et al*, 2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian (Moha *et al*, 2017) bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penelitian Agustini (2016) dan (Mokoginta *et al*, 2017) bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Harnoni, 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu **Pertama**, penelitian ini terdapat penambahan variabel independen tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Alasan penambahan variabel karena SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. **Kedua**, penelitian ini terdapat penambahan variabel independen tentang tekanan koersif. Alasan penambahan variabel karena dengan adanya tekanan koersif dari suatu peraturan dapat menimbulkan kecenderungan organisasi (pemerintah daerah) untuk memperbaiki menjadi lebih baik dan nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

B. Tinjauan Pustaka

1) Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (Hasibuan, 2015). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam teori keagenan dapat membantu pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam menjalankan amanat dari rakyat (*principals*) Jensen and Meckling (1976). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijadikan sebagai pedoman yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan supaya sesuai dengan tujuan rakyat (*principal*) dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian (Modo *et al*, 2016) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sako dan Lantowa (2018) yang menyatakan bahwa Penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2) Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM) (Suhardjo 2013). Sumber daya manusia yang berkualitas dalam teori keagenan merupakan pelaksana dalam melaksanakan amanat dari rakyat (*principal*) untuk pengelolaan keuangan daerah (Jensen and Meckling, 1976). Sumber daya manusia akan bertindak dengan kompetensinya yang sesuai dengan kepentingan rakyat (*principal*), karena kompetensi sumber daya manusia penting untuk membantu kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Berdasarkan penelitian (Firdaus *et al*, 2015) kualitas sumber daya memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian (Harnoni, 2016) kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian (Agung dan Gayatri 2018) menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Jurnali, 2002) pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Teori keagenan memiliki hubungan keagenan antara prinsipal dengan agen dalam melaksanakan tugas atas nama *principal*, teknologi informasi ini sangat diperlukan dalam proses melaksanakan tugas agar hasil sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak *principal* (Jensen and Meckling, 1976). Dengan memanfaatkan teknologi akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/kecepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna dan *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, sehingga diharapkan kualitas laporan keuangan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian (Rico Tampaty, 2016) dan (Harnoni, 2016) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan penelitian (Efendi *et al*, 2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

4) Sistem Pengendalian Intern

Menurut (Mahmudi, 2010) pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajaran untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terkait dengan teori keagenan seorang *principal* (eksekutif) dapat memecahkan permasalahan dengan memberikan kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya *monitoring*, sedangkan untuk hasil *monitoring* yang baik maka diperlukan pengendalian interen organisasi yang efektif (Jensen and Meckling, 1976).

Berdasarkan penelitian (Agustini, 2016) sistem pengendalian *intern* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5) Tekanan Koersif

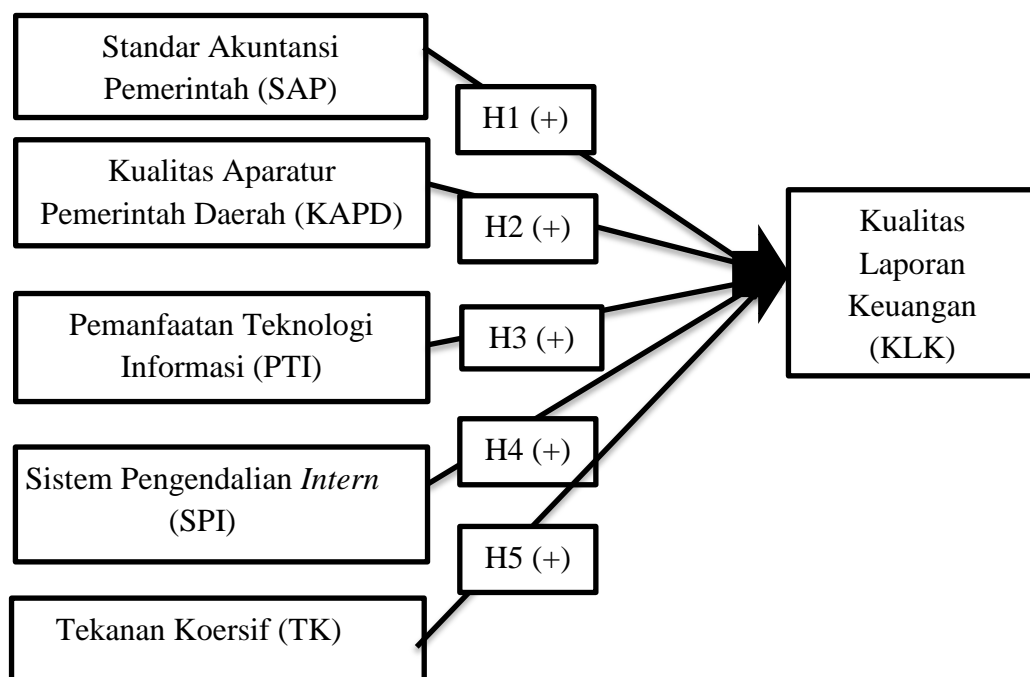
Tekanan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Ashworth *et al*, 2009). Teori Institusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dengan organisasi lain karena tekanan institusional, yaitu adanya koersif (*coercive*) (DiMaggio dan Powell, 1983). Tekanan koersif ini berasal dari faktor luar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap organisasi baik berpengaruh terhadap struktur maupun kegiatan dalam organisasi.

Adanya sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun pihak yang berkaitan bertujuan untuk menjadikan praktik dalam organisasi (pemerintah daerah) menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya peraturan maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas.

Berdasarkan penelitian Budiawan dan Purnomo (2014) menyatakan bahwa tekanan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5. Tekanan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kerangka Teoritis



Gambar 1
Kerangka Teoritis

C. Metoda Penelitian

Data Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh menggunakan instrumen kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kota Magelang yaitu sebanyak 17 Dinas, 6 Badan, dan 5 Kantor di Kota Magelang. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kuesioner diajukan kepada Kepala sub bagian keuangan, bendahara penerimaan atau pengeluaran, sekertariat dan staf bagian keuangan.

Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F, uji t.

D. Hasil

1) Analisis Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviation
SAP	99	3,20	5,00	4,1131	0,38403
KAPD	99	2,29	5,00	3,8038	0,50717
PTI	99	3,00	5,00	4,2508	0,43277
SPI	99	2,60	5,00	4,0606	0,44027
TK	99	2,70	5,00	3,6778	0,42560
KLK	99	3,00	5,00	4,0412	0,40916

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

2) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Suatu butir pernyataan dikatakan valid jika terjadi korelasi yang signifikan antara masing-masing pernyataan dengan jumlah skor seluruh pernyataan yang ditunjukkan dengan nilai KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin*) > 0,50.

Tabel 3
Cross Loading

Variabel	SAP	KAPD	PTI	SPI	TK	KLK	Ket
SAP1	0,789						Valid
SAP2	0,705						Valid
SAP3	0,840						Valid
SAP4	0,691						Valid
SAP5	0,796						Valid
KAPD4		0,769					Valid
KAPD5		0,833					Valid
KAPD6		0,831					Valid
KAPD7		0,742					Valid
PTI1			0,765				Valid
PTI2			0,647				Valid
PTI3			0,795				Valid
PTI4			0,729				Valid
PTI5			0,797				Valid
PTI6			0,731				Valid

Tabel 3
Cross Loading

Variabel	SAP	KAPD	PTI	SPI	TK	KLK	Ket
----------	-----	------	-----	-----	----	-----	-----

SPI1	0,575		Valid
SPI2	0,893		Valid
SPI3	0,816		Valid
SPI4	0,791		Valid
SPI5	0,620		Valid
TK5		0,778	Valid
TK6		0,866	Valid
TK7		0,722	Valid
TK8		0,882	Valid
KLK2		0,808	Valid
KLK4		0,766	Valid
KLK9		0,806	Valid
KLK10		0,824	Valid
KLK12		0,827	Valid
KLK13		0,831	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

3) Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018: 45).

Tabel 4
Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
SAP	0,818	Reliabel
KAPD	0,804	Reliabel
PTI	0,838	Reliabel
SPI	0,789	Reliabel
TK	0,828	Reliabel
KLK	0,895	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

4) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan (Ghozali, 2016).

Tabel 5
Hasil uji Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficient	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,008	0,334		0,023	0,982
SAP	0,128	0,099	0,115	1,296	0,198
KAPD	0,212	0,081	0,247	2,621	0,010
PTI	0,379	0,108	0,352	3,516	0,001
SPI	0,213	0,104	0,200	2,046	0,044
TK	0,082	0,042	0,120	1,939	0,055

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

$$KLK = 0,008 + 0,128 \text{ SAP} + 0,212 \text{ KAPD} + 0,379 \text{ PTI} + 0,213 \text{ SPI} + 0,082 \text{ TK} + e$$

5) Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Tabel 6
Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,817 ^a	0,667	0,649	0,27682

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

b. Uji F (*Goodness of Fit*)

Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (Ghozali, 2018: 98).

Tabel 7
Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14,263	5	2,853	37,225	0,000 ^b
Residual	7,127	93	0,077		
Total	21,389	98			

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

c. Uji t

Tabel 8
Uji t

Variabel	t_{hitung}	Sig	t_{tabel}	Keterangan
SAP	1,296	0,198	1,660	H ₁ Tidak Diterima
KAPD	2,621	0,010	1,660	H ₂ Diterima
PTI	3,516	0,001	1,660	H ₃ Diterima
SPI	2,046	0,044	1,660	H ₄ Diterima
TK	1,939	0,055	1,660	H ₅ Tidak Diterima

Sumber: data primer yang diolah, 2019

i. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga **H₁ Tidak Diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kota Magelang tidak maksimal. Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dikarenakan hasil evaluasi kinerja akuntabilitas, hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan kinerja instansi dan hasil evaluasi untuk mengukur keberhasilan unit kinerja instansi tidak dapat mempengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai akuntansi berbasis akrual memang belum sepenuhnya dimengerti oleh pegawai OPD Kota Magelang. Perpindahan dari basis kas ke basis akrual belum sepenuhnya dilaksanakan dan memang perpindahannya dilakukan bertahap hingga saat ini memakai akuntansi kas menuju akrual. Kesiapan SDM, sarana dan prasarana pendukung tentu menjadi faktor mendasar untuk keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi karena hubungan antara rakyat dengan pemerintah sebagai pemegang amanah untuk menyelaraskan tujuan masyarakat dan pemerintah melalui pelaporan keuangan (Jensen *and* Meckling, 1976). Jika penerapan standar akuntansi pemerintah lemah maka dapat menghambat penyusunan laporan keuangan. Jika penyusunan laporan keuangan terhambat maka pengelolaan keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2016) dan Modo *et al* (2016) yang menunjukkan bahwa SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

ii. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sehingga **H₂ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada pegawai bagian akuntansi atau keuangan OPD Kota Magelang sudah baik, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan disiplin ilmu akuntansi (Alimbudiono dan Fidelis, 2004). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pelaksana dalam melaksanakan amanat dari rakyat (*principal*) untuk pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia akan bertindak dengan kompetensinya yang sesuai dengan kepentingan rakyat (*principal*) (Jensen *and* Meckling, 1976). Hasil penelitian ini konsisten dengan (Kiranayanti dan Erawati, 2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

iii. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sehingga **H₃ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa sub bagian akuntansi atau keuangan OPD Kota Magelang telah melakukan pengolahan data transaksi keuangan dengan menggunakan *software* yang sesuai dengan perundang-undangan, laporan yang dihasilkan berasal dari sistem informasi yang terintegrasi, serta adanya jadwal pemeliharaan secara teratur atau peralatan yang usang atau

rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya (Nurillah dan Muid, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan keagenan antara prinsipal dengan agen dalam melaksanakan tugas atas nama *principal* (Jensen and Meckling, 1976). Teknologi informasi ini sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan tugas agar hasil sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak *principal*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus *et al*, 2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

iv. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sehingga **H₃ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu sistem pengendalian internal dalam organisasi, dapat mempengaruhi dan dapat menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa OPD di Kota Magelang telah menyelenggarakan sistem akuntansi sesuai dengan prosedur akuntansi, telah membuat dan menggunakan dokumen atau catatan yang memadai serta telah adanya pemisahan wewenang secara tepat dalam rangka pelaksanaan APBD (Nurillah dan Muid, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) bahwa adanya pengendalian internal yang dilakukan eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas) maka risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan dan akan menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

v. Pengaruh Tekanan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian menunjukkan bahwa variabel tekanan koersif tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga **H₁ Tidak Diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat mempengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan dan opini media massa dan opini masyarakat tidak dapat mempengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan. Peraturan Daerah maupun Peraturan Undang-undang tidak menjadi pengaruh dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori institusional (DiMaggio dan Powell, 1983), bahwa adanya tekanan koersif yaitu tekanan yang berasal dari luar organisasi yang diberikan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga lain tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mandala Putra, *et al* (2016) yang menyatakan bahwa tekanan koersif tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, standar akuntansi pemerintah dan tekanan koersif tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya OPD se-karisidenan Kedu sehingga dapat dijadikan generalisasi kesemua objek mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan seperti *good governance* (Widanaputra *et al*, 2018) dan sistem akuntansi keuangan daerah (Yulia Defitri, 2018) dikarenakan masih terdapatnya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung dan Gayatri. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.” *E-Jurnal Akuntansi* 23:1253.
- Agustini, Laila Yuliani. 2016. “Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *JURNAL BISNIS & EKONOMI* 14(1):56–64.
- Alimbudiono, Ria Sandra dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Ashworth, *et al*. 2009. “Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in The Public Sector’.” *Journal of Public Administration Research and Theory*. *JPART* 19:165–87.
- Budiawan dan Purnomo. 2014. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat).” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(1):276–88.
- DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields.” *American Sociological Review*.
- Efendi, Loli, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah).” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3(September):182–95.
- Firdaus *et al*. 2015. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuang.” *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4(1):45–54.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFPE.
- Harnoni. 2016. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jom FEKON* 3(1):1079–93.
- Hasibuan, Dini Rahmi, Iskandar Muda. 2013. "Analisis Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akral (Kasus Pada Pemerintah Kota Medan). Skripsi, Dipublikasikan, Universitas Sumatera Utara
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irwan, D. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Universitas Negeri Padang.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure."
- Jurnali, Teddy &. Bambang Supomo. 2002. "Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas, Teknologi Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Akuntan Publik." *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 5(2).
- Juwita, Rukmi. 2018. "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Trikonomika* 12(2):201.
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny dan Ni Made Adi Erawati. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(2):1290–1318.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. UPP STIM YKPN
- Martoyo, S. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 5. Yogyakarta: Cetakan Pertama: BPFPE
- Modo, Saerang dan Poputra. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*

7(2):14–30.

- Moha *et al.* 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (EMBA)* 5(2):1359–70.
- Mokoginta *et al.* 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2):874–90.
- Nurillah, As Syifa dan Dul Muid. 2014. “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *E- Journal Akuntansi UNDIP* 3(2):1–13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahann, (Online), (<http://www.ksap.org/sap/>), diakses
- Pujanira, Putriasri dan Abdullah Taman. 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy.” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6(2):14–28.
- Rico Tampaty, Dwi Cahyono dan Didik Eko Pramono. 2016. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Bondowoso).” 1–21.
- Rowan, Meyer dan. 1977. “Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony.” *The American Journal of Sociology*.
- Sako, Umar dan Felmi D. Lantowa. 2018. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.” *Journal of Accounting Science* 2(1):43.
- Suhardjo, Daniel Kartika Adhi dan Yohanes. 2013. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual).” *JURNAL STIE SEMARANG* 5(3):93–111.
- Sukaningrum, Tantriani. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Skripsi* 7(2):139–49.
- Widanaputra, *et al.* 2018. "Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar". "Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22(1):352-380
- Yulia Defitri, *et al.* 2018. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan."Jurnal Benefita Vol 3(1):64-75.